



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV (Empat)
Rapat ke	:
Jenis Rapat	: RDP
Dengan	: KPK, PPATK, BNN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 25 Juni 2020
Pukul	: 10.00 WIB – 11.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Ahmad Sahroni, S.E.
Sekretaris	: Novianti, S.E.
Acara	: Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL tahun 2021
Hadir	: A. Anggota DPR RI : 38 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, SH., MH.
3. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin (virtual)
2. Trimedya Panjaitan (virtual)
3. Masinton Pasaribu
4. Idham Samawi
5. Bambang D.H (virtual)
6. Arteria Dahlan
7. Ichsan Soelistio
8. Wayan Sudirta (virtual)
9. Agustiar Sabran (virtual)
10. H. Safaruddin (virtual)

/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos, M.Si
2. Ir. H. Sari Yulianti, M.T
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
4. Supriansa, SH., MH.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH.
2. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. H. Rahmat Muhajirin, SH. (virtual)
5. Bambang Haryadi, SE

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M
2. Eva Yuliana, M.Si.
3. Ary Egahni Ben Bahat, SH.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
2. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
3. N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S. H., M.Kn

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi
2. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, SH., MH, ACCS
3. H. Santoso, S.H
4. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani, SH., MH

B. Undangan:

- 1) Ketua KPK beserta jajarannya,
- 2) Kepala BNN beserta jajarannya,
- 3) Kepala PPATK beserta jajarannya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F.P-NASDEM (AHMAD SAHRONI, S.E.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita diberikan berkah yang luar biasa pada pagi hari ini.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Ketua KPK beserta jajarannya,
Yang terhormat Kepala BNN beserta jajarannya,
Yang terhormat Kepala PPATK beserta jajarannya,
Serta hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat dengar pendapat pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat dengar pendapat hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir sebanyak 26 dari 50 Anggota Komisi III dari 7 Fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Ketua KPK, Kepala BNN dan Kepala PPATK atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya meminta persetujuan mengenai acara rapat dengar pendapat hari ini yaitu:

1. Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL tahun 2021,
2. Tanya jawab dan,
3. Penutup.

Kami juga meminta persetujuan apakah rapat hari ini bisa akhiri pada pukul 11.30 WIB?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Ketua KPK, Kepala BNN dan PPATK untuk menyampaikan penjelasannya maksimal 10 menit jangan lama-lama,

Terima kasih.

KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BUHARI, M.Si):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Om swastiastu syalom namo budaya salam kebajikan

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi III

Rekan-rekan mitra Komisi III yang kami hormati,
Peserta RDP pada hari ini Bapak Kepala BNN, PPATK yang saya hormati
beserta jajarannya,

Perkenankan kami untuk menyampaikan terkait dengan rancangan kebutuhan anggaran RKA-KL KPK. Namun sebelum kami masuk pada angka tersebut tentu ada suatu pertanyaan besar bagi kita semua kenapa kita ada disini itu yang pertama. Yang pertama kita ada disini karena memang amanat Undang-Undang, yang kedua adalah kita ingin mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia itu yang pertama. Yang kedua dalam suasana sekarang pandemi covid KPK ikut andil dalam rangka penyelamatan keuangan negara khususnya anggaran yang digunakan untuk penanganan covid-19. Karena hal yang paling penting adalah keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tugas pokok KPK tidak asing lagi bagi kita semua tercantum dalam Pasal 6.

Maka tentu 6 (enam) tugas pokok ini harus kami laksanakan secara optimal dan diselenggarakan secara masif. Terkait dengan itu maka KPK dengan setrategi sasaran setrategis stak holdernya ada tiga. Pertama kita beranjak kepada visi. Visi KPK adalah bersama masyarakat menjadikan KPK sebagai Lembaga yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam mewujudkan Indonesia maju bebas dari korupsi. Inilah visi KPK yang kita emban sekarang. Selanjutnya menindak lanjuti visi tersebut ada sasaran setrategis yang kita capai:

1. Meningkatkan fokus, keterukuran dan dampak kegiatan pencegahan,
2. Mengoptimalkan kegiatan penindakan tindak pidana korupsi dan digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang,
3. Meningkatkan tingkat efektifitas dan akuntabilitas Kelembagaan,

Terkait dengan itu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini KPK sekarang membangun setrategi dengan 3 (tiga) pendekatan pemberantasan korupsi:

1. Pendekatan yaitu pendidikan masyarakat atau kita kenal dengan *public education effort*,
2. Pendekatan pencegahan,
3. Pendekatan penindakan,

Tiga pendekatan ini menjadi penting, yang pertama kita ingin melakukan pendekatan pendidikan masyarakat. Yang sarasannya adalah pertama jejaring pendidikan formal dan informal termasuk juga tingkat pendidikan dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Yang kedua penyelenggaraan negara dan partai politik serta rekan-rekan birokrat. Yang ketiga sasaran adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara. Kenapa ini kita lakukan karena memang tiga bidang ini sering terlibat terkait dengan kasus korupsi. Kita tidak ingin dan kita akan berupaya keras supaya orang tidak ingin melakukan korupsi itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua adalah pendekatan pencegahan. Kita paham bahwa korupsi terjadi itu karena sistem. Untuk itu Deputi Pencegahan KPK bekerja keras untuk melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Kita paham korupsi itu timbul karena sistem ...(suara tidak jelas) jadi korupsi terjadi karena sistem gagal, sistemnya lemah atau pun sistemnya buruk. Untuk itu kita lakukan kajian sehingga terjadi perbaikan sistem baik sistem tata niaga, sistem politik, sistem ekonomi maupun sistem yang terkait yang sering menimbulkan kejahatan korupsi.

Yang ketiga adalah penindakan, penindakan kita lakukan supaya orang tidak ingin orang takut melakukan korupsi. Dengan secara tegas tetapi fokusnya adalah tindak korupsi yang melibatkan kerugian negara bukan tindak korupsi yang lain. Yang berikutnya kita yakin tiga ini kalau kita kerjakan Pak kita didik masyarakat orang tidak ingin melakukan korupsi. Kita melakukan pencegahan supaya tidak ada peluang dan kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Kalau dua pendekatan ini berhasil maka tentulah penindakan pun akan ikut berhasil. Kalau penindakannya banyak maka pendidikan masyarakat pencegahannya itu gagal. Terkait dengan itu tahun 2021 KPK sesuai dengan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 955 miliar. Ini memang kalau kita melihat angka tahun 2020 naik dari Rp 854 miliar menjadi Rp 155 miliar. Mohon izin Bapak Pimpinan Komisi III,

Rekan-rekan yang saya hormati dari Komisi III,

Perkenankan kami karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK akan alih status dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Tentu hal ini juga akan mempengaruhi tentang dukungan anggaran. Begitu juga dengan strategi yang diterapkan KPK pastilah akan mempengaruhi anggaran. Untuk itu kami mengusulkan pada Komisi III kalau pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 955,08 miliar maka kami berharap apabila tiga pendekatan tadi kita lakukan kerja keras sehingga korupsi tidak ada karena itu adalah mimpi kita bersama Indonesia bebas dari korupsi. Anggaran yang kami butuhkan kurang lebih Rp 1.881 miliar terdiri dari 4 program:

1. Program dukungan manajemen Rp 1.595 miliar,
2. Program pendidikan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat Rp 155 miliar,
3. Program pencegahan dan mitigasi korupsi sebesar Rp 105 miliar,
4. Program penindakan juga Rp 65,6 miliar,

Sehingga usulan kami mohon izin kami sudah membuat surat permohonan kepada Komisi III, kepada Badan Anggaran, kepada Ketua DPR

RI maupun kepada Kementerian Keuangan usulan tambahan KPK kurang lebih Rp 925,8 miliar. Saya kira ini saja yang ingin kami sampaikan mudah-mudahan bisa dikabulkan sehingga upaya kita, setrategi kita, pendekatan kita bebas korupsi tiga pendekatan tadi bisa terjalin berjalan dengan lancar, berjalan secara integral holistic dan tentu berkelanjutan.

Terima kasih.

Mohon maaf lebih dan kurangnya saya akhiri.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om shanti shanti om.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketua.

Kurang dari 10 menit sangat diapresiasi. Silakan lanjut Pak Kepala BNN

BNN (Komjen. Pol. Drs. HERU WINARKO, S.H.):

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI,
Yang mulia Anggota Komisi III DPR RI dan hadirin sekalian,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan penjelasan atas pertanyaan Komisi III tentang pelaksanaan rencana kerja dan anggaran RKA-KL BNN tahun 2020 dan gambaran rencana kerja BNN tahun 2021 yang disusun berdasarkan pagu indikatif tahun 2021.

Pimpinan rapat dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya hormati,
Serta hadirin sekalian,

Prefensi penyalahgunaan narkotika dunia tahun 2017 diperkirakan telah mencapai 271 juta orang dengan usia 15 sampai 64 tahun dan setidaknya telah menggunakan narkoba satu kali. Selama satu dekade terakhir telah terjadi dipersitikasi zat yang tersedia dipasar obat terlarang. Selain zat-zat alami tradisional seperti ganja, kekoin dan heroin dekade terakhir terjadi perluasan pasar yang dinamis untuk obat-obatan sintensis dan penggunaan obat resep non medis. Kondisi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia dapat tergembar dari tinggi rendahnya angka prefensi penyalahgunaan yang diukur secara prodikstap 3 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2017. Angka prefentif penyalahgunaan narkotik menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2014 ke tahun 2017. Terjadi penurunan jumlah penyalahgunaan narkotika sebanyak 646.587 orang di tahun 2019. Angka prefentif penyalahgunaan narkotika sedikit mengalami kenaikan 0,03% namun demikian angka tersebut masih dibawah target lagi peningkatan prefensi dimana sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015 tahun 2019.

Ada kenaikan angka penyalah angka prefentif tersebut antara lain disebabkan karena semakin meningkatnya jenis ...(suara tidak jelas) yang beredar di masyarakat karena sudah lebih kurang 77 NPS yang beredar di masyarakat.

Pimpinan rapat dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Dalam hal dukungan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan BNN anggaran sebanyak Rp 1,76 triliun. Namun karena adanya kebijakan penghematan anggaran yang dikelola BNN menjadi Rp 1,62 triliun. Dengan anggaran tersebut realisasi sampai bulan Juni atau sebesar 31,23%. Masih belum optimal realisasi tersebut karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kita banyak kegiatan menggunakan virtual.

Pimpinan rapat dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Sebagai Kementerian Lembaga lain dengan adanya kebijakan untuk melakukan penghematan BNN juga telah melakukan penghematan sebanyak Rp 134,4 miliar. Penghematan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap satker pusat maupun juga satker di wilayah. Disamping telah melakukan penghematan anggaran dalam rangka penanganan covid-19 telah melakukan refocusing anggaran melalui revisi anggaran untuk revisi anggaran penanganan corona di BNN sebanyak Rp 17,5 miliar. Pimpinan rapat dalam pencegahan dan pemberantasan ...(suara tidak jelas) gelap narkoba dan ...(suara tidak jelas) gelap narkoba merupakan salah satu prioritas nasional dalam rangka pelaksanaan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari RPJMN tersebut dimana proses penyusunan pada saat itu masih pada tahapan penyusunan rencana kerja tahun 2021 berdasarkan pagu indikatif tahun 2021 BNN sebanyak Rp 1.689.992.511.000.

Besaran anggaran tersebut termasuk di dalamnya operasional dan non operasional serta belanja barang dan modal rencana akan diadakan pada tahun 2020 namun karena ada kebijakan penghematan diluncurkan pada tahun 2021.

Pimpinan rapat dan Anggota Dewan Komisi III yang kami hormati,

Apabila dibanding dengan alokasi anggaran tahun 2020 pagu indikatif tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 72,8 miliar. Dengan besaran anggaran dalam pagu indikatif tersebut BNN harus lebih mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan prioritas baik yang sifatnya mendukung prioritas nasional maupun prioritas Lembaga. Namun demikian dengan adanya kebijakan (suara tidak jelas) proses sampai dengan ...(suara tidak jelas) tahun 2021 BNN mengusulkan adanya penambahan anggaran sekitar 234 miliar antara lain untuk pelaksanaan kegiatan internasional ...(suara tidak jelas) dimana Indonesia sebagai host asistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkoba. Dimana revisi Undang-Undang ini merupakan salah satu prioritas dalam program legislasi

nasional, pembangunan sarana prasarana perkantoran untuk BNP, pemenuhan layanan ...(suara tidak jelas) dan pemenuhan peralatan pendukung tugas fungsi BNN serta dukungan untuk pelaksanaan bridging ...(suara tidak jelas) . Perlu kami laporkan kepada Pimpinan bahwa sekarang ...(suara tidak jelas) kita sudah bisa bridging dan sekarang sudah kita bisa menghasilkan anjing 20 ekor dan sudah usia 5 sampai 8 bulan dan ...(suara tidak jelas) kita latih Pak jadi kita mengurangi import anjing karena kalau kita import anjing, anjing-anjing ini tidak tahan lama Pak sudah 3 jam sudah ...(suara tidak jelas) . Mudah-mudahan yang kita bridging sekarang saya harapkan nanti BNN bukan hanya untuk anjing narkotika tetapi dia bisa untuk anjing dari bea cukai dan Kepolisian yang kita kembangkan di lido. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami selanjutnya kami mohon Pimpinan dan Anggota Dewan dapat memberikan dukungan kepada BNN sehingga BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan dapat ...(suara tidak jelas) pelayanan terbaik bagi masyarakat dibidang P4GN.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kurang dari 10 menit juga lebih cepat lebih baik. Pak Kepala PPATK dipersilakan.

KETUA PPATK (DIAN EDIANA RAE, S.H., LL.M):

Terima kasih pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Dalam suasana menghadapi pandemi Covid-19 semoga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat serta senantiasa dalam lindungan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,
Rekan kerja kami Ketua KPK, Kepala BNN,
Bapak dan Ibu sekalian,

Sesuai dengan undangan dari Sekretariat Komisi III DPR RI izinkan kami untuk menyampaikan paparan terkait dengan RKA-KL dan rencana kerja PPATK tahun 2021. Berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pagu indikatif belanja KL tahun anggaran 2021 untuk PPATK ditetapkan sebesar Rp 224.608.345.000 terbagi dalam dua program yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp 186.741.000. Kemudian program pencegahan dan pemeberantasan TPPU dan pendanaan terorisme sebesar Rp 41.421.604.000. Pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan PPATK dalam

rangka mewujudkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia melalui sasaran setrategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,
2. Penguatan regulasi dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,
3. Meningkatnya pihak pelapor dalam metigasi resiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,
4. Meningkatnya pemanfaatan produk intelegent keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
5. Pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang,
6. Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,
7. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,
8. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK dan meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK,

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

PPATK senantiasa berupaya untuk mengantisipasi setiap perkembangan dengan baik melalui penguatan sistem pelaporan dan analisis yang memadai dan terintegrasi. Meningkatkan kopetensi sumber daya manusia penanganan dan kordinasi yang baik dengan berbagai pihak baik dengan pihak regulator, Aparat Penegak Hukum maupun dengan pihak pelapor sebagai pemberi data, serta Lembaga Nasional dan Internasional. Berkaitan dengan itu serta sebagai antisipasi dalam menghadapi tantangan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan tindak pidana terkait serta menghadapi era new normal PPATK dituntut untuk melakukan penyesuaian proses bisnis organisasi yang dapat mendukung proses kerja yang resposif, efektif dan efisien. PPATK perlu melakukan peningkatan dari berbagai hal antara lain:

1. Pada penguatan sistem TI dengan mengimplementasikan sistem yang kita sebut sebagai Go AML sebagai upaya penguatan sistem pelaporan.
2. Peningkatan kopetensi sumber daya manusia PPATK,
3. Penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi,
4. Penguatan riset untuk memetigasi resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,
5. Peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan baik dalam maupun luar negeri,
6. Peningkatan kopetensi pemangku kepentingan baik apgakum maupun pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT melalui peningkatan peran pusdiklat aku PPT di Cimanggis Depok Jawa Barat,

Dalam mendukung peningkatan kinerja tersebut diperlukan pendalaman yang memadai namun tetap berpedoman pada prinsip efektif,

efisien dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan tersebut anggaran untuk program pencegahan dan pemberantasan TPPU yang hanya sebesar Rp 41,4 miliar dirasakan kurang memadai. Oleh karena itu kami telah menyampaikan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2021 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dilakukan pembahasan bersama dalam forum pertemuan pihak-pihak Kementerian Keuangan, Bappenas dan PPATK yaitu sebesar Rp 29,9 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Usulan penambahan pagu program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT sebesar Rp 23,1 miliar,
2. Usulan penambahan pagu program dukungan manajemen sebesar Rp 6,8 miliar,

Usulan penambahan pagu anggaran tersebut sangat kami perlukan guna membiayai kegiatan-kegiatan prioritas PPATK pada tahun 2021 dalam mendukung peningkatan kinerja pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu:

1. Penguatan sistem teknologi informasi berdasarkan roadmap IT master plan,
2. Proses keanggotaan di ...(suara tidak jelas) Indonesia,
3. Pengelolaan bidang hukum untuk penyusunan RUU Perampasan Aset,
4. Keterangan ahli TPPU di persidangan dan penyusunan amandemen Perpres Re Organisasi PPATK,
5. Pemeriksaan PPATK terkait pemeriksaan percepatan penanganan covid-19,
6. Pengelolaan sarana dan prasarana fleksibel ...(suara tidak jelas) space,
7. Dukungan PPATK atas pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana aksi nasional pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdagangan Gelap Narkotika (P4GN) dan prekuser narkotika tahun 2020 dan 2024 dengan kegiatan perdagangan ekspor serta kegiatan sosialisasi bahaya narkotika bagi pegawai PPATK,

Memperhatikan pertimbangan tersebut diatas mohon kiranya dalam forum yang terhormat ini Pimpinan dan Anggota Komisi III berkenan mendukung dan menyetujui usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 29,8 miliar dan dapat dialokasikan dalam penerapan pagu anggaran PPATK tahun 2021.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati,

Anggaran PPATK selalu difokuskan pada pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. PPATK senantiasa berkomitmen untuk mengelola APBN dengan akuntabel, efektif dan efisien yang tercermin dari pemberian opini WTP oleh BPK RI 13 kali berturut-turut sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Daya serap anggaran yang relatif tinggi yaitu realisasi anggaran 2019 mencapai 92,4%, capaian kinerja sebesar 102,45%. Kinerja perencanaan

pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang baik tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan bimbingan dari Pimpinan serta seluruh Anggota DPR RI yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada PPATK selama ini. Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatian bapak dan ibu sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,

Kita telah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari Ketua KPK, Kepala BNN dan Kepala PPATK. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita melaksanakan rapat dengan mitra kerja dalam rangka fungsi anggaran. Untuk itu kami meminta Anggota Komisi III yang akan memberikan pertanyaan hanya seputaran anggaran saja takutnya jangan melebar kemana-mana. Kami beri waktu maksimal 7 menit dan yang pertama
Silakan Pak Arsul.

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Terima kasih Pak Ketua yang bijak dan ganteng serta sangat rapi pada hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati,
Yang kami hormati Pimpinan mitra Komisi III yang hadir dari BNN, KPK dan PPATK,

Khusus untuk PPATK selamat Pak atas penunjukan sebagai Kepala PPATK yang baru. Nah

Bapak/Ibu sekalian,

Pertama-tama tadi saya menyaksikan walaupun tidak lengkap dari presentasi Pak Pimpinan KPK tentang penambahan anggaran ya Pak Firli ya. ini sebetulnya hal yang sudah kami tunggu-tunggu. Rasanya Komisi III yang nanti ko KPK tidak pernah mengajukan tambahan anggaran. Kali ini Pimpinan KPK mengajukan tambahan anggaran. Tentu ketika ruang fiskalnya nanti terutama pembahasan di Banggar besar itu memang memungkinkan

paling tidak paksi PPP akan mendukung akan ikut memperjuangkan tetapi kan sekali lagi kita harus melihat nanti ruang fiskal dan pembicaraan secara keseluruhan terkait dengan KL ini di Banggar besar tetapi secara prinsip saya kira kita menyetujui. Namun persetujuan ini bukan tanpa syarat Pak dan tidak gratisan. Tidak gratisan itu bukan berarti kita minta sesuatu dari KPK itu pasti di OTT duluan kita sebelum minta. Nah tentu yang ingin kami tekankan adalah pertama anggaran yang sudah ada di pagu dan mungkin nanti berapa pun tambahannya itu dipergunakan fokus untuk penanganan perkara-perkara yang besar. Yang saya kira berbagai elemen masyarakat sipil dan kami sendiri yang di Komisi III juga sudah menyampaikan dan sesuai pesan Pak Ketua Rapat tadi tentu saya tidak menyinggung itu terlalu dalam tetapi fokusnya adalah seperti itu.

Saya yakin saat ini walaupun diluaran kinerja KPK saat ini diragukan tetapi kami tidak ikut-ikutan meragukan loh Pak ya. Kami yakin bapak-bapak *on the track* sesuai dengan program kerja yang telah digariskan. Nah jadi Pak Firli dan bapak-bapak jajaran bapak/ibu jajaran KPK yang ingin kami tekankan adalah pergunakanlah ini untuk maksimal untuk perkara-perkara yang besar. Karena anggaran KPK saya melihat kalau saya hitung yang ini yang bapak ajukan disini mulai dari lidik, kemudian dik sampai tut dan eksekusi per perkara ini kalau saya hitung Rp 352 juta. Ini jumlah yang kalau saya bandingkan kemarin kami sudah dengan Polri dan Kejaksaan Agung kita sama-sama bandingkan *aple to apalnya* dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi tipikor di Polri dan juga di Kejaksaan Agung itu jauh lebih tinggi. Karena itu kalau yang ditangani ecek-ecek itu Anggota DPR RI ditingkat dua dan lain sebagainya ya menurut kami tidak pas KPK ada disitu. Kalau pun katakanlah ada OTT atau penanganan itu ya dilimpahkan kepada Gakum yang lain.

Jadi itu yang kami ingin sampaikan sebagai dukungan dengan catatan kepada KPK dan Insya Allah ini akan kita suarakan juga di Banggar besar nanti. Yang selebihnya tentu yang ingin kami ingatkan adalah ada beberapa catatan yang diberikan oleh BPK RI sebagai auditor negara terhadap KPK. Ini juga saya kira perlu menjadi perhatian walaupun ini terjadi sebelum masa Pimpinan yang saat ini menjabat. Saya melihat misalnya tetapi ini mudah-mudahan sudah diselesaikan soal uang sitaan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi belum tereksekusi. Kemudian juga ada juga ini kelebihan pembayaran renovasi gedung KPK C1 tahap 2 267 tidak besar-besar si memang tetapi ini toh karena ini hasil temuan BPK RI maka mau tidak mau memang harus juga di tindak lanjuti. Nah kemudian untuk BNN ini Pak Heru. Besok hari Jumat mau ada acara apa itu Pak. Saya kira secara khusus tidak ada yang ingin kami soroti hanya barang kali greget BNN di media harus ditingkatkan itu saja Pak supaya nanti tidak ada lagi suara BNN dibubarkan saja begitu tempo hari ada juga kan suara begitu.

BNN ini tetap kita perlukan apalagi nanti kalau revisi Undang-Undang Narkotika itu kita jalankan tentu ada peran-peran yang ingin kita tekankan lagi kepada BNN juga disana. PPATK saya kira tidak ada kalau buat saya terus terang penyajian yang paling baik itu selalu dari PPATK karena jelas *outputnya* segala macam. Selamat Pak meskipun Bapak 13 kali mendapat

WTP tetapi juga tetap ada catatan-catatan. Hanya catatannya saya melihat dari BPK RI tidak terkait dengan angka-angka temuanlah dan lain sebagainya tetapi hanya tata kelola administrasi yang memang harus diperbaiki. Ya namanya auditor kalau tidak ada catatannya itu tidak ini juga hebat berarti auditornya jadi tetap pasti ada catatan. Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Arsul.

Ini PAN kayanya belum ada saya lompat ke PKS Pak Adang.

F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Baik terima kasih Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi III dan juga jajaran mitra kerja.

Kami akan menyampaikan beberapa lebih bersifat penjelasan. Sesuai arahan Pimpinan tadi bahwa kita hanya akan berbicara tentang anggaran dan apa yang dilaporkan. Pertama mungkin saya ingin meningkatkan kepada seluruh mitra yang hadir tolong betul-betul hasil daftar laporan hasil pemeriksaan LHP-Nya BPK RI tolong dipelajari kembali, karena buku yang kami terima dari hampir seluruh mitra yang hadir itu ada catatannya tolong untuk bisa di dalam dan segera diselesaikan. Kami masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya tidak akan banyak tetapi saya ingin meminta penjelasan saja di halaman 13 tentang program dan kegiatan dan *output*. Dimana dalam konteks volume itu dinyatakan bahwa misalnya penyelidikan 96, perkara yang dilakukan penyidikan 120 dan selanjutnya di halaman 14. Kami mohon kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan volume, karena saya takut ini menjadi suatu target akhirnya berdasarkan target itu segala apa pun juga dilakukan suatu proses itu yang perlu diperhatikan.

Lalu untuk BNN, BNN saya lebih ingin mendengarkan esensi dari pada usulan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar 234.054.960.000. Nomor dua adalah asistensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dimana pada tahun ini menjadi salah satu prioritas. Kami ingin mendapatkan satu masukan pointer saja. Apa si yang menjadi permasalahan mendasar sehingga undang-undang tersebut perlu perubahan, itu untuk BNN. Terakhir untuk PPATK terima kasih pemberian opini WTP-nya sudah 13 kali tolong dipertahankan karena ini sangat penting sekali dan juga saya sependapat teman-teman juga semangatlah untuk memberikan dukungan kepada mitra kerja untuk meningkatkan suatu hasil yang maksimal. Saya ingin mendapatkan juga penjelasan dari PPATK di halaman tiga bahwa penambahan itu antara lain adalah poin 3 pengelolaan bidang hukum untuk penyusunan RUU Perampasan Aset. Keterangan ahli TPPU di persidangan dan menyusun amandemen proses reorganisasi PPATK.

Saya juga di Komisi III saya juga di Baleg jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya kepentingan saya juga. Jadi saya minta penjelasan tersebut.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak H. Adang.
Selanjutnya dari Partai Demokrat Santoso.

F.PD (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,
Kepala BNN, KPK dan PPATK,

Pertama untuk *bugeting* ini saya coba melihat-lihat dan di halaman 13 untuk KPK disini ada pelayanan sumber daya manusia disebut pelayanan perkantoran Pak 12 bulan Rp 617 miliar begitu. Kemudian ada nomenklatur yang sama juga dalam penyelenggaraan operasional perkantoran namanya layanan perkantoran juga. Jadi seperti ada duplikasi dan menurut saya juga terjadi ini di Kementerian atau Lembaga yang lain. Jadi program-program ini seperti copy paste dan mohon ini coba nanti dijelaskan. Kemudian yang berikutnya termasuk untuk yang lain-lain saya hanya ingin menyimpulkan baik kepada BNN maupun PPATK. Tampaknya program untuk sumber daya manusianya lebih banyak dibandingkan program-program yang menjadi tupoksi dari masing-masing bidang. Menurut saya ini tidak sehat begitu harusnya ya operasionalisasinya yang lebih besar termasuk KPK juga begitu. Penanganan internal tetapi penindakannya sedikit, BNN juga demikian saya tidak sebut angkanya tetapi umumnya semua Lembaga ini lebih kecil anggarannya penindakannya dibandingkan kegiatan-kegiatan internal mereka termasuk juga maintenance kantor dan lain sebagainya. Ini perlu dievaluasi

Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian di Komisi III,

Supaya hal-hal ini tidak terjadi terus-menerus setiap tahunnya dan saya menilainya ini akhirnya cuma hanya menggugurkan kewajiban penyusunan anggaran ini begitu. Kalau pun misalnya sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas ya menurut saya mungkin kerjaan mereka juga terlalu banyak kali sehingga apa yang menjadi usulan tahun-tahun kemarin ya diloloskan saja padahal menurut saya tidak perlu disetujui seperti itu dan mungkin pada kesempatan-kesempatan rapat yang lain sehubungan dengan masalah anggaran ini kita mesti tahu juga mungkin penganggaran dua tahun mundur sehingga kita bisa tahu begitu terutama dalam hal masalah internal itu jangan-jangan setiap tahun dianggarkan padahal banyak kepentingan lain dalam hal fungsi dan tugas dari masing-masing Kementerian atau Lembaga itu. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Selanjutnya PKB.

F.PKB (H. CUCUN SYAMSURIZAL, M.A.P.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III,
Pak Ketua KPK beserta jajarannya,
BNN juga seluruh rombongannya juga di PPATK sama,

Terima kasih atas kesempatannya yang menjadi catatan kami di Fraksi PKB. Dari paparan yang disampaikan oleh bapak-bapak ini cukup luar biasa kami apresiasi bagaimana keinginan untuk berbuat dan bekerja untuk kepentingan bangsa. Seperti yang disampaikan dan dipaparkan tadi baik dari pada penanganan korupsi, penanganan narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang disampaikan oleh PPATK. Kami sangat memahami kebutuhan-kebutuhan ini karena seperti yang dipaparkan Pak Ketua KPK alih status amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu memang perlu dukungan anggaran karena pasti ada belanja pegawai yang bergeser untuk kebutuhan penguatan SDM di KPK sendiri dan kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan kasus kemudian juga hal-hal yang disampaikan dipaparkan tadi untuk belanja operasional kita bisa memahami.

Cuma seperti tadi Fraksi-Fraksi yang lain kita akan sama-sama mendukung bagaimana Pak Lembaga KPK ini bisa kuat dan bisa mempunyai dukungan operasional dalam pencegahan korupsi, sebagaimana yang sekarang kita lihat begitu penataannya luar biasa dan kita harapkan bagaimana penataan dari pada kepegawaia alih status ini bisa terselenggara dengan dukungan anggaran dan kita lihat nanti ruang fiskal yang ada di pembahasan APBN tahun 2021 ini semoga bisa mencukupi apa yang diusulkan oleh Pak Ketua tadi. Yang kedua saya melihat BNN tadi ada sedikit pergeseran dari *base line* pagu anggaran yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN tadi dari dipa awal tahun 2020 menjadi indikatif ini pasti akan terjadi pengurangan-pengurangan pergeseran dari pada belanja barang belanja operasional Pak. Kalau toh misalkan usulannya yang kita melihat dalam pagu indikatif yang disampaikan ini, yang disampaikan kepada Komisi III untuk usulan-usulan pasti sama Komisi III akan *support* bagaimana langkah-langkah bapak untuk penanganan narkoba ini betul-betul bisa hilang dan ruang gerak dari pada bandar-bandar narkoba ini sudah bisa bapak deteksi dari dini.

PPATK segala prioritasnya luar biasa tadi yang menjadi rencana aksi kemudian juga rencana bagaimana keinginan membuat satu draft regulasi yang dibutuhkan oleh PPATK ya cuma sedikit kan Rp 29 miliar Ketua ini

kebutuhannya. Kita Komisi III juga ikut *support* dan semoga apa yang diharapkan bapak-bapak ini baik dari KPK, BNN juga dari PPATK juga bisa kita bantu dan ruang fiskalnya betul-betul bisa memungkinkan untuk pembahasan tahun 2020-2021.

Terima kasih Ketua.

Wallahulmuafiq Illa Aqwamthoriq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Selanjutnya Nasdem Ibu Eva.

F.P-NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Pimpinan PPATK, KPK dan BNN beserta jajaran,
Semua jajarannya yang hadir,

Sesuai dengan arahan Pimpinan *to the poin* singkat, padat dan tepat. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada KPK. Yang pertama kami mengapresiasi penyerapan anggaran yang cukup tinggi di tahun 2019 dan untuk tahun 2020 Fraksi Partai Nasdem merasa memahami apabila penyerapan anggaran menurun namun karena covid dan lain sebagainya. Namun mungkin ini masih ada waktu Pak untuk mengejar barang kali ini bisa penyerapan itu bisa lebih ditingkatkan lagi di tahun 2020. Yang berikutnya adalah barang-barang yang sudah disita atau eks gratifikasi sesudah mendapatkan keputusan hukum yang tetap agar dipercepat proses lelangnya, karena memelihara barang-barang tersebut itu memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi dan *value* atau nilainya semakin lama semakin turun tentunya kecuali barang-barang antik mungkin ya Pak dan untuk itu sebaiknya ditentukan batas waktunya berapa lama disimpan dan kemudian realisasi untuk lelangnya dan berikutnya kepada KPK.

Karena ada dinamika perubahan struktur maupun sistem kerja lainnya yang ada dalam internal KPK yang membawa dampak pada anggaran seperti tadi disampaikan oleh Bapak Firli yaitu perubahan pegawai KPK menjadi ASN dan lain sebagainya dan sesuai dengan itu kami Fraksi Partai Nasdem mendorong dan mendukung KPK menambah anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan untuk program pencegahan korupsi yang menjadi perhatian utama kami. Tentu ini tetap dengan syarat seperti yang disampaikan Pak Arsul tadi dan ini saya hanya pertegas saja bahwa syaratnya adalah tetap efektif, efisien dan lebih profesional serta akuntabel dalam realisasi anggarannya nanti. Yang berikutnya kepada PPATK, pertama realisasi anggaran tahun 2019 PPATK mencapai 92,54% dengan capaian kinerja 102,45%. Anggaran PPATK 3 tahun terakhir relatif stabil di angka 200n

miliar. Nah ada kenaikan meskipun sedikit dari tahun ke tahun mengingat capaian kinerja yang selalu diatas 100% kami merasa Fraksi Partai Nasdem patut kiranya memberikan apresiasi kepada PPATK.

Kami menyoroti anggaran PPATK yang melakukan analisis transaksi dan pengelolaan laporan masyarakat yang hanya berjumlah Rp 2 miliar per tahun. Pak ini kira-kira efektif tidak Pak Rp 2 miliar untuk sekian kinerja atau tupoksi yang kita harapkan sesuai dengan targetnya. Kalau memang ini tidak efektif saya rasa ini harus di rubah di evaluasi Pak agar semuanya bisa terealisasi dengan baik. Yang berikutnya BNN anggaran BNN 5 tahun terakhir selalu diatas Rp 1,5 triliun bahkan pada tahun 2016 meningkat tajam menjadi 2,5 triliun. Nah belanja operasional dan non operasional nyaris seimbang sehingga dana ini bisa digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penindakan dengan baik kami berharap demikian. Namun saya menyoroti usulan tambahan anggaran yang bapak sampaikan sebesar Rp 234 miliar dimana usulan dana tambahan itu digunakan salah satunya untuk melakukan asistensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang nantinya itu sebetulnya juga akan dibahas di Komisi III DPR RI ini Pak. Nah yang kami tanyakan adalah asistensi apa yang ingin disampaikan BNN. Bukankah tanpa penambahan anggaran khusus BNN pasti diminta pendapatnya tentang RUU tersebut. Demikian Pimpinan terima kasih yang bisa saya sampaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Silakan lanjut Gerindra.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMANN, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati para Pimpinan Lembaga KPK, PPATK, BNN, Pimpinan Komisi dan rekan-rekan Anggota Komisi,

Secara prinsip kami Partai Gerindra terkait usulan penambahan anggaran ketiga Lembaga ini cukup meyakinkan sepanjang ruang fiskal memungkinkan kami juga mendukung. Namun hasil pemeriksaan BPK RI kami minta agar tetap ditindak lanjuti. Yang pertama KPK kami sepakat dan kami mendukung dengan kebijakan anggaran yang mengacu pada tiga strategi tadi yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan. Dalam konteks pencegahan ini ada masukan sedikit Pak terutama juga di institusi bapak sendiri. Kami melihat ya sepengetahuan kami itu rumah dinas Pimpinan kendaraan dinas itu kalau rumah dinas kalau setahu kami belum ada. Jadi riskan sekali institusi sebesar KPK sepenting KPK tugasnya berat, ujung tombak penegakan hukum dibidang kolusi Pimpinannya rumah

dinasnya tidak jelas. Saya pikir juga itu perlu dipertimbangkan Pak juga terkait fasilitas. Kami melihat kadang-kadang kalau raker disini fasilitas yang digunakan saja yang saya lihat terlalu sederhana pak, kadang-kadang gadgetnya saja sudah jadul begitu kan kaya ipad yang bapak pakai itu adalah sudah ketinggalan zaman banget Pak sama kaya punya saya Pak. Sederhana itu belum tentu bagus juga Pak. Dalam konteks tertentu tugas bapak kan tracking dan lain-lain sebagainya. Jadi hal tersebut juga justru diperhatikan dari institusi bapak sendiri. Itu untuk KPK.

Kemudian BNN saya melihat realisasi belanja modal, belanja barang terutama belanja modal masih rendah sekali ya ini sudah bulan Juni baru 10,66%, kemudian belanja barang masih 30% sekian mungkin itu perlu diperhatikan dan BNN ini saya pikir anggaran itu terpenting adalah selain dipenindakan juga Pak disosialisasi. Karena dinamika saat ini yang namanya produk narkoba itu bermacam-macam bentuknya. Masyarakat tidak tahu Pak ada bentuk permen, ada bentuk coklat dan lain sebagainya nah itu kalau disosialisasikan maksimal dengan anggaran yang maksimal, sosialisasi dengan anggaran yang maksimal saya pikir lebih cepat tujuan BNN tercapai. Jadi sosialisasinya Pak digencarkan dengan anggaran yang maksimal juga. Mungkin itu

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Selanjutnya Golkar.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III,
Yang saya hormati mitra kerja BNN, KPK, PPATK yang sama-sama saya banggakan,

Saya tidak mau kalah cepat dengan Pak Habiburokhman Insya Allah saya persingkat habis-habisan ini. Untuk BNN saya hanya menarik kesimpulan tadi soal pembahasan soal pengadaan anjingnya itu. Saya pernah membaca bahwa anggaran biaya anjingnya itu jauh lebih besar dari pada biaya manusia. Sepertinya kita ini lebih percaya cara penciumannya anjing dibanding cara penciumannya manusia. Mungkin karena anjing tidak bisa terima amplop-amplop tetapi kalau manusia mungkin bisa. Saya bangga kepada BNN yang mencoba menstimulasi ini sehingga anjing lokal bisa digunakan. Kira-kira itu yang menjadi perhatian saya bagaimana anggaran-anggaran yang bisa untuk di BNN ini supaya bisa kita bisa meminimalisir soal penggunaannya kepada alat-alat seperti pengadaan anjing dan lain sebagainya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada BNN

menyangkut masalah sistem pengendalian atas belanja. Karena ini menjadi atensi bagi BPK RI setelah bapak berturut-turut 3 tahun WTP saya lihat.

Berarti pengendalian anggaran sangat bagus sekali oleh BNN. Ada catatan disitu bahwa realisasi belanja barang kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba dan Deputi Bidang Pencegahan tidak akuntable. Terdapat kesalahan penganggaran dan pembebanan belanja barang pada beberapa satker. Ini catatan harapan saya salah satu diantara catatan yang diberikan oleh BPK RI ini bisa menjadi atensi bagi bapak-bapak yang ada di BNN dengan seluruh jajaran yang ada karena menyangkut masalah ada juga satkernya. Ada dua disitu proses penunjukan penyedia jasa pemeliharaan peralatan infrastruktur IT yang ada di intelegent juga menjadi salah satu sorotan. Harapan kita kedepannya ini dalam rangka pemenuhan anggaran nanti saya kira bisa menjadi hal yang sangat positif bagi BNN.

Yang kedua sistem pengendalian atas pengelolaan aset. Ini tadi ini saya kira saya sudah singgung sedikit salah satu aset yang kita miliki itu. Menurut BPK RI pengelolaan kas tunai pada beberapa satker tadi itu masih perlu ditertibkan. Ini catatan saya kira ini perlu kita menjadi perhatian khusus untuk itu dan yang kedua rekening bendahara pengeluaran pembantu di beberapa satker pusat BNN itu juga belum digunakan. Sudah digunakan atau belum digunakan Pak ya? belum ya. saya kira kedepannya untuk pelaporannya keuangan kita supaya kita lebih bagus mungkin bisa digunakan itu. Itu dari saya untuk BNN. Kalau untuk KPK alih status yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua kita bisa memhami itu bahwa memang pasti membutuhkan sebuah reposisi dan anggaran sudah tidak bisa dihindari itu. Kalau saya hanya tekankan Pak Ketua dirubah menjadi status apa pun itu KPK saya berharap tidak menghilangkan rasa independensinya kawan-kawan di KPK dalam rangka memburu orang-orang yang memang berniat jahat untuk penyalahgunaan anggaran negara dan saya yakin kawan-kawan KPK bisa berganti baju tetapi tidak berganti independensinya. Itu yang saya yakini kawan-kawan di KPK yang bekerja.

Yang kedua adalah saya setuju dengan Bapak Prof. Arsul Sani tadi bahwa ada ya kalau kita kan memandang ilmunya beliau itu sudah Profesor. Ilmunya beliau ini kita banyak belajar sama beliau ini. Kira-kira temuan-temuan ada kecurigaan-kecurigaan kita terhadap penyelenggara negara yang anggarannya kecil setuju saya. Saya kira tidak perlu atau tidak penting barang kali KPK turun tangan disitu diangka 1 miliar kebawah. Harapan kita karena ada biaya-biaya anggaran yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di KPK itu jangan sampai biaya anggaran itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang menjadi harapan tetapi saya paham benar bahwa ini dalam rangka menciptakan efek jera buat penyelenggara negara yang bermain-main saya setuju untuk itu semuanya tidak pandang bulu, angkanya kecil, angkanya besar disama ratakan tetapi kita mencoba untuk saling membangun komunikasi antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan saya kira kita bisa berbagi dengan membangun komunikasi itu.

Yang kecil-kecil barang kali dibawah 1 miliar kita serahkan kepada kawan-kawan di Kepolisian untuk memburunya atau di Kejaksaan yang

besar-besar menjadi harapan dan tumpuan kita masyarakat Indonesia ini terhadap KPK yang memang besar harapan kita ya itu yang kita atensi Pak Ketua. Itu saja dari saya untuk Pak Ketua KPK dan PPATK. Relatif PPATK di mata saya Pak, saya hanya mengucapkan selamat. Saya rasa PPATK ini hanya dua yang menjadi perhatian saya karena ini juga menjadi harapan BPK RI yaitu yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian sistem pengendalian intern ya yang saya maksud maupun penilaian kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Ada dua itu satu penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan negara bukan pajak. Ini berlarut-larut jadi saya kira ini bisa diatensi. Yang kedua pelaksanaan bimbingan teknis kepada pihak pelapor tidak di dukung dengan perencanaan dengan proses konfirmasi yang cukup memadai. Saya kira ini hanya perlu ditingkatkan dan menjadi atensi buat kawan-kawan di PPATK. Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ternyata lebih lama dari pada Gerindra koreksi. Selanjutnya awalnya itu Pak Supriansa ngomong anjingnya keras sekali lain waktu ngomongin anjing Pak BNN pelan-pelan saja ini masanya rapat takutnya nanti diluar dianggapnya ini ko ngomong anjing-anjing begitu. Selanjutnya PDIP.

Silakan.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi III yang saya hormati,
Para Anggota Komisi III yang saya hormati,
Para mitra kerja Bang Firli Ketua KPK, Kepala BNN Mas Heru, Kepala PPATK yang baru,

Pertama-tama saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin walfaidzin mohon maaf lahir dan batin.

Tiga Lembaga Negara ini hadir pasca reformasi sebagai ciri dari Lembaga Hukum modern tetapi cenderung kita tidak serius untuk memperhatikan mereka. Pertama-tama saya ke KPK apresiasi Pimpinan KPK Pak Firli dan teman-teman. Sebenarnya inilah raw model yang kita harapkan KPK saat ini tidak gaduh, bekerja dalam keheningan, kerja-kerjanya substantif, mencermati, korupsi-korupsi yang terseruktur, sistematis dan masif. Hanya satu-satunya mitra ini yang saya ingat ini teman-teman Komisi III juga. Yang pada saat rapat langsung ditindak lanjuti padahal beliau tidak mengatakan saya kerjakan tidak saya akan coba akan cermati. Rapat kemarin kita sudah meminta beliau untuk mencermati sesuatu tetapi dalam masa persidangan berikutnya langsung sudah ada hasilnya. Ini yang katakan dan ini bukan

barang sembarangan yang dikerjain yang berimplikasi luas dan saya pikir mempunyai daya politis yang sangat tinggi tetapi KPK sekarang ini berani, berani berhadap-hadapan dengan kekuasaan, berani juga tampil untuk tidak populer.

Kemudian Bang Firli pastinya Komisi III Fraksi PDI-Perjuangan poksi PDIP mendukung penuh kita pasang badan walaupun tidak ada apresiasi publik, tidak ada media ekspose, tidak ada apresiasi dari pegiat korupsi seperti ICW ini yang saya katakan jelas double standar kemana mereka hening pada saat KPK melakukan giat-giat yang luar biasa ini pada saat ini. Saya ingin bicara mengenai pencegahan. Bang Firli ini masalah tadi saya menarik ini kalau kami ini diajarkan dari kecil budi pekerti ya. Tadi dikatakan KPK akan mulai pencegahan dari TK sampai ke Perguruan Tinggi. Zaman saya dulu orang hebat itu orang pintar bang cendikiawan itu orang hebat Pak tetapi kan kalau anak-anak sekarang ponakan-ponakan saya orang pintar itu orang kaya Pak tanpa kita lihat dia asal kayanya dari mana.

Kami juga apresiasi dalam paparan yang disini juga KPK ternyata sudah tahu sumbernya. Sumbernya ini masalah sistem tadi dikatakan sistem yang gagal, lemah, sistem yang buruk. Fokus tujuannya juga sudah tahu bagaimana tata niaga, masalah dibidang per politikan dan masalah dibidang ekonomi itu yang kita bilang sudah bisa dan pandai untuk mencermati permasalahan mudah-mudahan kita seiring sejalan. Kami mohon betul bang anggarannya 955 tetapi pencegahan dan penindakannya hanya 139 jadi teman-teman juga mohon dicermati kasihan juga ini KPK. Dari 139 untuk litnya cuma 10 setengah miliar untuk 96 kasus artinya satu kasus 105 jutalah. Untuk bik cuma 15 miliar untuk 120 kasus bayangin itu, untuk tut 13 miliar untuk 120 juga. Kalau tadi Pak Arsul mengatakan itu tinggi iya tinggi Pak Arsul tetapi yang namanya saksnya KPK itu berjibun Pak. Jadi memang angka segini saya katakan jangan-jangan tidak cukup juga. Saya senang Bang Firli minta tambahan anggaran tetapi saya belum kelihatan Bang yang tambahannya dipaparan Abang ini tidak dikasih ke kita.

Pastinya secara prinsip terkait dengan postur yang dihadirkan terkait dengan rencana tambahan anggaran secara prinsip PDI-Perjuangan bisa memahami, bisa menyetujui baik postur maupun usulan tambahan anggaran tetapi kembali Bang Firli yang mau kita ingatkan sedikit mengenai masalah janji-janji kami kemarin terkait dengan masalah rumah dinas, masalah mobil dinas, masalah fasilitas kemanan ini Bang Firli kan Polisi tidak ada yang berani sama Bang Firli tetapi kalau yang sipil-sipil ini bagaimana bang ada yang kauli dan sebagainya. Kemudian masalah asuransi kita barusan berhadapan dengan saudara kita Pak Novel Baswedan kalau pun nanti ada apa-apa kemudian terkait dengan penyidik KPK kita juga harus pikirkan jangan sampai pembiayaannya nanti seperti yang kemarin Pak Firli harus ada juga semacam inisiatif dari KPK untuk menghadirkan pagu-pagu anggaran terkait dengan itu. Kami juga apresiasi terkait dengan KPK sekarang berani melimpahkan perkara dulu tidak berani tangani sendiri pom sekarang dilimpahin walaupun nanti diejek-ejek sama publik.

Ini yang saya katakan lakukan terus Bang Firli tetapi ada sedikit Bang ini kalau dulu laporan pemeriksaan BPK RI Bang saya yakin KPK-Nya memang berantakan tetapi zaman Bang Firli jangan lagi berantakan Bang Abang ini hukum saja luar kepala dan lebih jelimet. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Kita ke BNN untuk BNN memang negara tidak adil Pak tidak sungguh-sungguh untuk memberantas narkoba. Jadi kalau dibilang ada darurat narkoba Pak dari tahun 71 darurat narkoba Pak tetapi tidak kelihatan Pak. BNN ini hanya hadir sebagai prasyarat negara hukum modern selebihnya tidak ada sudah. Bagaimana kami juga ingatkan nanti minta tolong sama BNN juga lebih progresif lagi. Politiknya PDI-perjuangan politik afirmatif Pak politik keberpihakan. Kami mendukung penuh BNN lahir zamannya Ibu Mega ini. Kita mendukung penuh segala gerak giat langkah BNN apa pun itu bahkan sekali-kali BNN salah kita bilang selalu benar. Kenapa biar teryakinkan publik urusannya benar salahnya biar dengan Komisi III tetapi untuk berantas korupsi butuh keyakinan pak.

Nah tetapi sekarang Pak Kepala Mas Heru saya melihat memang ada penghematan, ada *refocusing*, pagu kita turun pertanyaannya dari yang angka 1763 ke 1628 ini perubahannya derastis tidak buat kerja-kerja kita. Kita juga mohon maaf Mas belakangan ini kan Polisi lebih hebat nangkepin narkoba dibanding BNN. Saya tidak kelihatan itu siapa itu Abang kita ini? Iya Pak Arman ...(suara tidak jelas) biasanya luar biasa semangatnya sekarang sudah dibelakang-belakangnya melimpir dia apa karena anggarannya karang atau sebagaimana itu. Nah kami mohon betul Pak zamannya Pak Buas kita sering diajak-ajak Pak sama Bang Arman juga. Kalau bisa saya minta satu Pak Jawa Timur itu ke Madura Pak. Kemudian Sumatera itu Pantai Timur Sumatera Pak. Ini kita harga mati Pak buat narkoba ini harus kita berantas habis. Kami minta betul teman-teman kalau bisa anggaran ditambah lebih juga kita pikir masih bisa Pak. Untuk PPATK pertama atas nama PDI-Perjuangan kita turut berduka cita beliau bagi kami tokoh yang luar biasa hebat bagaimana bisa bekerja dalam keheningan pak.

Bisa mencermati mana yang perlu dikerjakan dan tidak perlu dikerjakan. Kemudian selamat kepada Kepala PPATK yang baru mudah-mudahan hubungan yang bagus dengan Komisi III ini bisa terus berlanjut. Paham harus kerja apa PPATK ini. Anggarannya memang kecil saya juga kalau dilihat kaya begini kan belanja tetapnya 183, anggarannya 224 pencegahannya cuma 41 miliar untuk seluruh Indonesia dan berapa juta umat yang harus diawasi. Saya mohon Pak Kepala jangan patah semangat harus cerdas pandai bermain juga untuk mengkriet itu memainkan skala prioritas. Saya minta betul TPPU mana yang harus kita cermati. Jangan dikejar pejabat negar pak, jangan dikejar Polisi rekening gendut. Polisi rekening gendung paling 2 triliun, 7 triliun, 15 triliun bukan saya katakan itu tidak boleh tetap kita ini tetapi bagaimana kejahatan korporasi yang berskala besar. Konyolnya lagi menggunakan koperasi Pak kayak Indosurya, kemudian Cipaganti dan sebagainya itu yang harus bapak kejar. Kalau kita kejar pejabat negara DPR RI ...(suara tidak jelas) pejabat negara yang ngerjain yang pejabat negaranya lagi itu pun dampaknya tidak begitu masif.

Kami mohon betul di depan mata ini ada casenya Jiwasraya bisa bapak mainkan dulu Pak nanti kita konekan bapak dengan Bapak Jaksa Agung nanti. Berikutnya juga bagaimana kejahatan fintech Pak itu yang harusnya juga dicermati yang baru dan pada prinsipnya Pak Kepala kami menyetujui dan memahami usulan penambahan anggaran. Saya juga sedih loh bayangin PPATK memohon untuk dapetin 29,8 miliar itu loh. Kita ini kaya tidak bernegara Pak jangan-jangan kalau Om Roni ngirim duit 29 miliar cuma 2 hari bisa Pak. Ini setahun Pak Roni sedih banget kita. Mudah-mudahan ya pada prinsipnya kita bisa mendukung tetapi mitra BNN, KPK dan PPATK kami mohon betul untuk temuan-temuan BPK RI ini kita coba untuk cermati dan mudah-mudahan pastinya DPR RI akan mendukung apabila ada kesulitan juga terkait dengan masalah temuan BPK RI bisa berkomunikasi dengan Komisi III.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ternyata untuk Fraksi yang paling panjang PDI-P lebih dari 10 menit. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Pada para Ketua KPK, Kepala BNN dan PPATK bilamana mau ditanggapi ada hal-hal yang perlu ditanggapi secara umum atau memang hanya sebatas penerimaan informasi atau aspirasi tidak perlu dijawab dan kalau pun ada yang keluar pada saat bertanya tidak perlu dijawab. Sebelum habis saya perpanjang 30 menit sampai jam 12 mohon kiranya untuk tidak berlama-lama menjawab karena banyak kegiatan yang lain. Saya rasa tadi juga Pak Supriansa mengenai anjing tadi Pak saya konsen disitu saja Pak kalau yang lain saya kurang konsen pak.

Terima kasih.

Silakan Pak Ketua KPK.

KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BUHARI, M.Si):

Terima kasih Pimpinan Komisi III.

Rekan-rekan Komisi III yang saya hormati dan banggakan,

Perkenankan kami untuk menanggapi beberapa yang tadi disampaikan. Secara umum saja nanti ada saya tidak akan sebut satu-satu tetapi saya akan coba untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Yang pertama adalah terkait dengan fokus pekerjaan KPK. KPK fokus kepada pekerjaan di Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Disana diamanatkan bahwa KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terkait dengan perkara korupsi. Pertama subyek hukumnya adalah penyelenggara negara Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait dengan Aparat Penegak Hukum atau pun penyelenggara negara. Yang kedua adalah kita tetap kepada fokus kepada kejahatan korupsi yang menimbulkan kerugian negara itu poin pertama. Poin kedua saya juga akan masuk terkait dengan catatan

BPK RI tahun 2018, dimana KPK mendapat predikat atas laporan keuangan KPK tahun 2018 dengan predikat wajar dengan pengecualian. Ini PR pertama yang kami kerjakan seketika kami masuk di KPK.

Kami dilantik pada tanggal 20 Desember 2019. Langkah pertama yang kami lakukan adalah evaluasi terkait anggaran 2019. Temuan-temuan yang terkait tahun 2018 untuk tahun 2019 sudah kami tindak lanjuti karena memang temuan tersebut berasal dari temuan pengelolaan barang bukti, benda sitaan bank rampasan. Karena banyak hal yang tidak bisa diberikan penjelasan terkait dengan status penggunaan barang sitaan, status penetapan status penggunaan barang sitaan barang rampasan. Untuk itu kami sudah bekerja dan sudah kami sampaikan dengan BPK RI. Insya Allah tahun 2019 kerja keras KPK akan membuahkan hasil dengan predikat laporan keuangan mudah-mudahan bisa mencapai wajar tanpa pengecualian. Kami tidak ingin mendahului tetapi waktu itu kami bertanya saya tanya kepada rekan-rekan saya yang 4 orang apakah ini akan kita biarkan atau harus kita kerjakan. Saya semangat untuk mengerjakan dan tindak lanjut atas temuan tersebut. Walaupun saya akan tahu persis apa kira-kira pendapat orang. Pertama kalau wajar tanpa pengecualian banyak akan mengatakan ah itu kan kerjaan tahun 2019 bukan pekerjaan Pimpinan sekarang tetapi kalau nanti dapat predikatnya wajar dengan pengecualian KPK memang tidak benar khususnya Pimpinan sekarang.

Sehingga kami semangat seluruh insan KPK melakukan perbaikan terkait dengan laporan hasil keuangan, laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2019. Yang berikutnya kami ingin menyampaikan juga tadi ada yang bertanya tentang target perkara. Mohon izin bapak memang kita ada pergeseran pendekatan pemberantasan korupsi. Kalau selama ini ibaratkan kalau orang main bola strikernya itu adalah penindakan tetapi sesungguhnya apabila kita ingin memberantas korupsi tidak hanya sekedar penindakannya dikedepankan, pencegahan ulangi, pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan harus mendapatkan resep yang sama, porsi yang sama dan dosisnya pas jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Karena semua ini harus bergerak untuk memberantas korupsi. Sehingga mohon izin tadi Pak Adang saya sebut langsung tadi ada sebutan penyelidikan 96 kasus, penyidikan ada 120 kasus, penuntutan sekian nah ini disebutkan Pak. Saya ingin sampaikan kepada bapak ini adalah terkait dengan penyusunan rancangan anggaran serta kegiatan berapa banyak uang yang kita butuhkan.

Karena sesungguhnya uang itu ditentukan karena strategi yang kita lakukan. KPK sekarang dengan tiga strategi pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan dan ini porsinya berbeda Pak. Jadi kalau tadi bapak tanyakan kenapa harus ada volume ini bukan target Pak ini adalah perencanaan kegiatan sehingga kita bisa hitung berapa kira-kira anggaran yang kita butuhkan tetapi yang pasti Pak saya ingin sampaikan ke bapak khususnya untuk terkait dengan tambahan anggaran. Kita mengedepankan pendidikan masyarakat sehingga tambahan anggaran pendidikan masyarakat kita mintakan Rp115.300.000.000 pendidikan masyarakat. Karena kami beranggapan berpikir kalau pendidikan masyarakat itu sukses maka tentulah tidak perlu ada penindakan karena orang tidak ingin melakukan korupsi. Yang

kedua adalah pencegahan. Pencegahan yang kami usulkan Rp 105.137.731.000 ini pun kalau kita sukses pencegahan maka tidak perlu melakukan penindakan tetapi KPK tetap tegas apabila masih ada yang melakukan korupsi kita akan melakukan penindakan dan anggarannya kurang lebih Rp 65.597.534.000 ini kira-kira kami ingin sampaikan Pak.

Yang berikutnya kami akan masuk terkait tadi ada yang bertanya dihalaman 13. Mohon izin kami sampaikan

Bapak-bapak yang terhormat,

Tadi ada disampaikan oleh Pak Santoso dihalaman 13. Ada kegiatan disitu yang disebut dengan layanan perkantoran. Nah pertama program manajemen sumber daya manusia dengan sub kegiatan layanan perkantoran dengan kode anggaran 994 itu sebanyak 12 bulan. Tentu kita langsung tahu apa yang dilakukan 12 bulan itu ada tidak lain dari pembayaran gaji pegawai jumlahnya adalah Rp 617.961.106.000 yang mengelola adalah unit kerja SDM. Yang berikutnya penyelenggaraan operasional perkantoran. Ini adalah terkait dengan layanan perkantoran berupa pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran air dan telepon serta IT ini jumlahnya Rp65.104.539.000 ini saya kira mudah-mudahan ini tidak ada duplikasi karena memang dua-duanya sangat berbeda dan yang mengelola pun berbeda. Selanjutnya tadi disampaikan bahwa ada kekhawariran tentang alih status. Istilah alih status ini memang sesuai dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Istilah alih status karena memang bukan pengangkatan. Kalau pengangkatan pegawai ASN tentu akan merugikan KPK karena syarat Undang-Undang ASN umurnya tidak boleh lebih dari 35 tahun. Bagaimana dengan nasih Pak Cahya disamping kanan saya yang umurnya diatas 50. Tentu kita tidak mengangkat ASN tetapi kita mengatakan alih status. Begitu draft yang dibuat oleh pemerintah terkait Peraturan Pemerintah alih status pegawai KPK menjadi ASN. Status ASN tidak pernah mempengaruhi endepensi KPK karena sesungguhnya KPK melaksanakan tugas bebas dari kekuasaan, merdeka, endependensi dan tidak terpengaruh dengan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Yang terakhir ingin kami sampaikan waktu RDP beberapa waktu lalu betul kami sempat ditanyakan oleh Komisi III tentang bagaimana program kartu pra kerja. Kami sampaikan sejak bergulirnya atau kita mengalami pandemi covid-19 pemerintah sudah melakukan syarat 6 program dan hari ini jumlah anggaran pemerintah yang dikeluarkan yang disiapkan untuk 6 program kurang lebih Rp 695,70 triliun.

KPK hadir sejak awal bagaimana kita memberikan surat edaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa ada 8 rambu-rambu. Bagaimana juga kita memberikan saran masukan kepada Menteri Sosial tentang bantuan sosial. Begitu juga kita bagaimana kita bekerja sama dengan Menteri Kesehatan terkait dengan pengadaan alat kesehatan, pemberian insentif dokter, tenaga medis, tenaga laboratorium termasuk claim asuransi dari pada rumah sakit. Saya ingin menjelaskan dulu yang kartu pra kerja tadi Pak.RDP yang lalu memang menyinggung tentang kartu pra kerja. Saya memang tidak

sampaikan saat itu saya siap akan kerjakan tetapi begitu selesai RDP begitu pulang saya panggil Deputi Pencegahan saya bilang kartu pra kerja anggaran Rp 5,6 triliun, sarannya 5 juta orang, sudah bergulir tahap 1 tahap 2 tahap 3 kurang lebih jumlahnya 682.000 sasaran. Kami sampaikan dan kami lakukan kajian setelah kami lakukan kajian kami rapat dengan Bapak Menko Bidang Ekonomi Bapak Airlangga termasuk dengan tim unit kerja yang menangani kartu pra kerja.

Hasil rapat kami lakukan penelitian kajian selanjutnya hasil kajian tersebut kami lengkapi dengan rekomendasi kami sampaikan dengan pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Ekonomi Menko Ekonomi dan dihadiri oleh para pihak yang terkait. Saran kami waktu itu ...(suara tidak jelas) perlu dilakukan perubahan mekanisme, perlu dilakukan perbaikan regulasi. *alhamdulillah* pemerintah saya sangat apresiasi beliau-beliau mendengarkan kata dan suara KPK sehingga program kartu pra kerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini kami sambil menunggu perbaikan. Apa yang kami lakukan ini juga dalam pencegahan terjadi korupsi akan lebih baik kita menyelamatkan uang negara dari pada kita menangkap seseorang tetapi uangnya sudah hilang lebih dahulu. Banyak kawan-kawan bertanya berapa keuangan negara yang keluar kartu pra kerja kami jawab itu bukan domes kami tetapi yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan perbuatan kartu pra kerja program kartu pra kerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini itulah semangat KPK yang sekarang. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

Saya akhiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketua.

Sangat lugas dan mungkin Kepala BNN.

BNN (Komjen. Pol. Drs. HERU WINARKO, S.H.):

Baik terima kasih.

Pak Ketua mungkin saya menjawab sama dengan Ketua KPK bahwa tidak satu persatu secara umum saja yaitu masalah temuan BPK RI kemarin kita exit *briefing* dengan Pimpinan BPK RI kita ada perbaikan-perbaikan dan memang kita fokuskan untuk masalah manajemen resiko bapak. Ini yang paling penting manajemen resiko dari situ ...(suara tidak jelas) kegiatan-kegiatan supaya menjadi fokus di BNN. Lalu untuk kami juga perlu saya sampaikan di forum ini saya dengan Ketua KPK dengan Ketua BNPT kita melakukan ...(suara tidak jelas) gabungan Pak untuk pencegahan Pak. Jadi karena obyeknya sama Pak jadi anggaran kita tidak terlalu kita jadikan satu Pak. Kita sama-sama ke masyarakat dan kami dibidang fokus di BNN adalah media sosial Pak. Saya ajak KPK dan BNPT menggunakan media sosial kami kita ...(suara tidak jelas) ke generasi muda kita Pak. Ini yang kita lakukan sehingga kalau berbicara ada sosialisasi kita lebih banyak fokus ke IT Pak

tetapi nanti kalau secara fisik mungkin mau datang sama-sama kami sudah bekerja sama dengan KPK kalau ada kegiatan BNN, KPK ikut, BNPT ikut obyeknya sama Pak dan medianya campur pak.

Mungkin juga ini dari bapak-bapak semua kalau ada kegiatan bukan hanya berbicara narkoba tetapi juga berbicara mengenai korupsi, bicara masalah radikalisme. Karena ini isu tiga ini yang kita lakukan Pak bersama dan para Deputi ketiga instansi ini sudah ketemu Pak sudah jalan untuk program-programnya. Memang mungkin nanti perlu dari teman-teman Komisi III bisa ikut bergabung Pak, bergabung masuk di wilayah masing-masing Pak. Itu yang kita lakukan dan sudah berjalan Pak tinggal nanti Bapak-bapak bisa dengan kami kebetulan juga nanti malam minggu Ketua BNPT, Ketua KPK sama saya kita dengan Slank untuk anti narkoba nasional Pak. Kita tampil bareng Pak untuk generasi muda Pak.

Lalu selanjutnya untuk tadi masalah politik revisi Undang-Undang Pak. Ini ada beberapa yang perlu kami fokuskan karena terutama untuk masalah pokusor Pak. Di Undang-Undang Nomor 35 memang BNN hanya khusus narkoba Pak tidak menangani pokusor. Padahal pasal pokusor ini sekarang ada 72 jenis yang sedang beredar di, ini sebenarnya bagi kami bukan hanya yang paling banyak 65% adalah ganja Pak di Indonesia ini.

Sisanya sabu dan yang sebenarnya yang agak banyak beredar dimasyarakat ini adalah NPS Pak, pcc, tramadol ini murah sekali harganya Pak. Yang kita mungkin ingat kemarin sebulan dua bulan yang lalu kita ada pabriknya Pak Arman fokus kesana Pak. Ini yang kita lakukan Pak kalau misalnya revisi tolong ini yang menjadi domen termasuk juga sanksi untuk pidana NPS ini Pak ini yang kami ajukan untuk revisi. Yang kedua mengenai rehabilitasi Pak. Ini masih ada dispiut antara sosial dengan medis dan kami sudah memfasilitasi sudah menguat rehabilitasi secara standarisasi Pak. Sudah mungkin dalam undang-undang ini diperkuat Pak termasuk juga yang TAT Pak. Yang sering saya sampaikan kami melatih penyidik, jaksa sama hakim menyamakan persepsi Pak Karena yang ditangkap oleh Polisi itu tidak termasuk semuanya pengedar Pak ada pengguna Pak. Ini yang benar-benar kita bisa kita pilahkan. Sekarang ini ada posisi di lapas dari 260.000 napi ada 140.000an adalah narkoba dan 40.000 ada pengguna Pak.

Nah ini mungkin yang akan kita lakukan untuk masalah revisi ini Pak. Lalu yang selanjutnya Pak untuk mengenai ...(suara tidak jelas) kita Pak untuk operasional. Kami perlu sampaikan ke bapak kami mohon dukungan Bapak karena narkoba ini yang tadi banyak di luar Pak. Jadi kami terus terang saja kaya pengajuan anggaran tambahan kami perkuat Pak untuk kerja sama dengan luar negeri Pak. Tahun lalu kita mengadakan pelatihan gabungan Pak ada 12 negara ikut Pak dari Arab Saudi, Colombia ikut Pak di BNN Pak. Ini kita menyamakan persepsi untuk mapping Pak mereka Pak. Jadi setrategi kami adalah bukan menangkap di Indonesia Pak kalau bisa di hulunya Pak. Kaya Malaysi tahun kemarin saja 2,5 ton Pak Januari kemarin mereka 1 ton Pak metapitamin Pak. Lalu 3 hari yang lalu Pak Myanmar Pak di sumbernya metapitamin Pak sabu Pak mereka dapat 18 ton Pak di pusatnya di ...(suara tidak jelas) Pak. Ini memang kita berusaha mengajak mereka Pak.

Saya temui mereka pimpinan-pimpinannya mereka saya terus terang saja secara pribadi setelah bilateral *meeting* saya ada informal dengan dia saya sampaikan jangan kirim ke Indonesia.

Ini yang kita lakukan termasuk dengan Belanda Pak. Belanda juga sekarang bukannya ektesi Pak tetapi ...(suara tidak jelas) produksinya juga sabu Pak di Belanda Pak. Ini posisi yang sekarang dan untuk dengan Polri Pak terus terang saja kita gabungan dengan mereka Pak. Kita operasi-operasi kita gabungan dengan bea cukai lalu kalau misalnya nanti yang ditangani oleh Polisi mereka tangani Pak jadi mereka informasi ke kita Pak. Lalu tangkapan yang di Banten, yang di Sukabumi itu kita sama Pak mereka lapor ke kita dan kami tidak mau tampil sebenarnya Pak dan sebenarnya terus terang saja Pak yang sekarang di Polisi kebanyakan orang BNN Pak. Jadi yang kemarin berhasil di zamannya Pak Budi Waseso Pak kita apresiasi jadi ikut sespati ikut apa mereka kembali ke Polisi Pak tidak apa-apa dapat promosi disana dan bagi saya seperti saya waktu di KPK penyidik-penyidik KPK saya suruh sekolah kembali ke Polisi jadi Kapolres bagi saya tidak ada masalah Pak. Yang penting bagaimana narkoba ini tidak di Indonesia Pak. Jadi bukan hanya BNN dengan Polisi bukan bea cukai tetapi bisa kita berantas pak.

Di luar kita stop Pak kaya sebulan yang lalu kaitannya ditangkap oleh Polri Pak itu di Srilangka mereka dapat 1 ton Pak tujuannya kita Pak ke Aceh Pak Srilangka Pak. Jadi kita kesana Pak kerja samanya di luar. Kalau masuk ke dalam ya kita sama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kepala BNN.
Silakan lanjut Pak, Ketua PPATK.

KETUA PPATK (DIAN EDIANA RAE, S.H., LL.M):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Anggota Komisi III yang kami hormati,

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi Pak atas saran dukungan yang telah disampaikan kepada PPATK selama ini dan terkait dengan penambahan anggaran yang sudah kami sampaikan hari ini Pak mungkin mohon maaf mungkin kami juga untuk mengingat waktu juga tidak akan satu-satu Pak kami akan menjawab hal-hal yang kami anggap perlu kami jelaskan di dalam kesempatan yang sangat baik ini.

Yang pertama sekalian yang terkait dengan temuan BPK RI itu Pak kami bisa menjawab hampir seluruhnya sebetulnya selesai kita sudah selesaikan dan hanya tinggal beberapa poin saja mungkin akan kita tindak lanjuti Pak. Kemudian yang terkait dengan masalah temuan-temuan yang terkait dengan mungkin saya bisa sampaikan yang terkait dengan masalah

tadi yang sangat pertanyaan mungkin saya agak sedikit putar Pak karena ini menjadi kor bisnis kita Pak. Pak Arteria tadi menyebutkan bagaimana mengenai cara kita bekerja ini Pak apakah kita akan fokus kepada lembaga negara dan atau korporasi dan lain sebagainya.

Saya kira isu yang paling penting kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini PPATK itu Pak bekerja berdasarkan apa yang kita sebut sebagai nasional ...(suara tidak jelas) kita melakukan analisis terhadap resiko yang kita hadapi di dalam konteks pencucian uang ini Pak dan sebagaimana mungkin sudah dimaklumi ada 26 jenis kejahatan ekonomi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang Pak. Tentu disini dengan KPK juga bekerja sangat intens Pak karena kalau kita melihat urutannya ancaman tindak pidana pencucian uang masih datangnya pertama itu dari narkoba, korupsi pak, kemudian juga terkait dengan perpajakan, perbankan, keuangan dan lain sebagainya. Jadi saya kira tadi bisa berdasarkan analisis resiko seperti itu kemudian kita melakukan penelitian Pak dan itu biasanya kita melakukan bukan biasanya Pak ini memang secara otomatis kita melakukan kerja sama dengan Lembaga terkait Pak. Kalau misalnya terkait dengan saya ambil contoh misalnya dengan BNN dengan Pak Heru ini kita sangat intens dalam membongkar jaringan Pak jaringan narkoba ini sangat. Karena kalau ibaratnya dengan penjelasan yang sangat mudah Pak kalau teman-teman di Aparat Penegak Hukum ini memang mengejar-ngejar penjahat nah kalau PPATK mengejar uangnya penjahat Pak. Jadi memang kira-kira itu yang dua-duanya kami menanggapi itu harus terjadi Pak. Memang kalau buat PPATK bagaimana caranya untuk memberantas kejahatan ekonomi khususnya memang keduanya itu harus paralel Pak tindak pidananya asalnya ditindak kemudian tindak pidana pencucian uangnya juga ditindak saya kira itu akan ada efek jera dan lain sebagainya.

Nah terkait dengan masalah itu memang ada urutan-urutan Pak pekerjaan yang kami sampaikan. Kemudian yang terkait dengan RUU Pak memang yang tadi perampasan aset, itu sebetulnya sejalan Pak dengan memang arah pemerintah yang sebetulnya di prolegnas sebelumnya sudah masuk RUU mengenai Perampasan Aset. Karena memang dari beberapa arahan dari Bapak Presiden misalnya bahwa dalam memberantas tindak pidana itu salah satu yang paling penting bagaimana *asset recovery* Pak ini. *Asset recovery* ini menjadi sangat penting pertama melalui tindak pidana pencucian uang ini Pak. Kalau misalnya tindak pidana pencucian uang ini kemudian kita tindak itu *asset recovery* diperkirakan akan sangat signifikan Pak yang bisa di dapat oleh negara.

Yang kedua ini terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Ini memang fokus Pak kepada aset-aset yang tidak jelas Pak mungkin orangnya meninggal, orangnya kabur karena ini kan terkait dengan kejahatan Pak jadi ini masih ada ruang yang masih belum dimanfaatkan jadi belum bisa kita pakai Pak. Jadi BNN juga masih kesulitan, KPK juga masih ada kesulitan karena Undang-Undang ini belum ini Pak. *Alhamdulillah* mudah-mudahan Pak ini dapat dorongan dari Komisi III bahwa nanti bisa masuk ke prioritas kira-kira begitu Pak yang terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Memang ada RUU lain Pak sebetulnya yang sudah dimasukan dan ini juga

sangat penting buat kita RUU yang terkait dengan Pembatasan transaksi uang kertas Pak. Ini sempat juga masuk prioritas tetapi juga ini nampaknya tidak tahun ini Pak mungkin tahun depan dan ini saya kira bagian yang juga sangat penting bagaimana kita bisa memperkuat sistem keuangan di Indonesia dalam waktu bersamaan juga kita memang bisa mencegah tindak pidana pencucian uang. Kemudian kalau dilihat dari pekerjaan analisis saya kira terima kasih Pak

Bapak dan Ibu sekalian,

Memang kelihatannya anggaran kita memang kalau kita lihat anggaran kor ini seperti kecil tetapi nampaknya memang hampir semua Lembaga menghadapi yang sama karena *standing* kita kan lebih banyak di belanja pegawai gaji dan lain sebagainya itu dimasukkan kepada Lembaga masing-masing sehingga memang ini menjadi cukup besar tetapi kami di dalam keterbatasan anggaran tersebut karena memang kerja analisis kita Pak kerja pemeriksaan kita itu memang bisa dikatakan selama ini masih cukup bisa memadai Pak. Karena tadi kita memang tidak mengejar hampir seluruh Pak karena kalau seluruhnya bayangkan saja Pak ada 300 laporan mencurigakan setiap hari harus kita bahas, harus kita analisis dan kita periksa Pak dan ini membutuhkan prioritasasi Pak jadi kita harus membikin prioritas ini apakah ini *high risk*, *medium risk*, *low risk* Pak.

Oleh karena itu kemudian kita memilih mana yang paling beresiko yang paling besar mungkin bisa dikatakan tadi Pak. Jadi memang kasus-kasus yang kita serahkan misalnya ke KPK, serahkan ke berbagai Lembaga itu skalanya memang tidak skala kecil Pak rata-rata itu skala-skala besar tadi sesuai dengan saran dari bapak dan ibu sekalian saya kira kita memang memprioritaskan yang besar-besar sekali. Jadi itu Pak yang terkait dengan kerja analisis kita. Kemudian dalam konteks PNBPN tadi ada disinggung terkait dengan masalah pendapatan non pajak kita. Memang ini sebetulnya mungkin kalau PPATK itu tidak bisa terlalu diharapkan banyak tetapi juga sangat mungkin Pak kita memang mendapatkan PNBPN itu dari *training* kita misalnya Pak dari training terhadap pelapor itu kan hampir seluruh bank dan non bank Pak.

Kemudian yang terkait dengan PNBPN yang lain kemungkinan pengenaan sanksi Pak pengenaan sanksi juga cukup besar. Kalau yang terkait dengan pendapatan negara Pak tadi yang sempat ada dipertanyaan yang terkait dengan di halaman 3 nomor 3 Pak. Ini ada terkait dengan RUU Perampasan Aset kemudian juga terkait dengan penyusunan amandemen Perpres Reorganisasi PPATK Pak ini juga kami mohon dukungan juga karena kami sebetulnya belum melaksanakan pertemuan dengan Kementerian PAN RB tetapi kami sudah melihat setelah 18 tahun ini kami perlu melakukan penyesuaian dalam segala hal Pak. Ini memang peningkatan IT kita organisasi kita dan SDM kita harus ditingkatkan sedemikian rupa Pak. Beberapa hal yang kami dapat sampaikan yang sangat penting Pak dari reorganisasi ini. Kita konsen betul bahwa memang pendapatan negara dari pajak itu harus ditingkatkan. Salah satu komponen yang penting di organisasi kita adalah kelompok fiskal Pak. Fiskal ini dari hasil kerja sama kita dengan

Direktorat Jenderal Pajak itu sangat signifikan Pak sebetulnya sangat besar sehingga kalau kita melihat dalam jangka waktu yang sangat singkat saja mungkin angka 4 triliun dan lain sebagainya itu sudah bisa kita capai.

Nah ini kenapa ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian, karena memang pajak itu sebagaimana tadi saya sampaikan di nasional ...(suara tidak jelas) kita Pak itu masih merupakan komponen yang sangat beresiko Pak. Ini yang terkait dengan teks ...(suara tidak jelas) atau penghindaran pajak ini sehingga kita akan juga bagaimana memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara melalui peningkatan perpajakan ini dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak contohnya begitu Pak tetapi ada beberapa memang penyesuaian organisasi yang kita lakukan agar organisasi kita ini lebih bisa dikatakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang. Demikian

Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Mudah-mudahan ini sudah menjawab semua konsen dari Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih memang Pak tadi kalau melihat jumlah terima kasih betul Pak terima kasih atas dukungannya. Saya sampai ikut sedih Pak sebetulnya kalau mengajukan tadi ternyata tambahan kita cuma 29 miliar, terima kasih atas dukungannya Pak.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Kami telah mendengar penjelasan dan jawaban dari Ketua KPK, Kepala BNN dan Kepala PPATK atas pertanyaan yang telah disampaikan Bapak/Ibu Anggota Komisi III. Dari hasil pembahasan anggaran ini akan kami bawa dalam rapat internal Komisi III dan keputusan hasil rapat internal tersebut akan kami sampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis dan untuk disinkronisasikan kebetulan tadi ada Pimpinan Banggar juga disini Pak Ketua jadi mudah-mudahan dapat diacceptlah langsung, bukan begitu Pak Wakil Ketua ya saya langsung tembak saja ini. Kalau tadi mendengar dari Pak Habib mana Pak Habib tentang fasilitas Ketua KPK yang belum memiliki rumah dinas kalau begitu sekarang rumahnya lagi kos ya Pak.

Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah selesainya pembicaraan seluruh materi rapat pada hari ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat dengar pendapat secara fisik dan virtual pada hari ini. Sebelum rapat dengar pendapat ini saya

tutup kami persilakan Saudara Ketua KPK, Kepala BNN dan Kepala PPATK secara bergantian untuk memberikan *closing statment*, kami persilakan. Oh langsung saja, oke waktunya tinggal 7 menit sebenarnya tetapi karena langsung kita tutup.

Maka demikian sudah acara pada rapat kerja hari ini semoga semua yang hadir pada hari ini diberikan barakoh dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya kepada Ketua KPK, Kepala PPATK, Kepala BNN.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 11.50 WIB)

Jakarta, 25 Juni 2020

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001